



BRIDA
KUTAI KARTANEGARA

#bangga
melayani
bangsa
BerAKHLAK
... BerAKHLAK... BerAKHLAK... BerAKHLAK...

RANCANGAN AKHIR RENJA 2027

BADAN RISET DAN INOVASI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KABUPATEN
KUTAI
KARTANEGARA





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung Bappeda-BRIDA Lt.4 Tenggarong

Telp. (0541) 6669156 Fax (0541) 6669155

Laman : brida.kukar.go.id Pos-el : balitbangda24@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-30/Umtak/900.1.1.2/07/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2026 perlu di bentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 153);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah;

12. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 566/SK-BUP/HK/2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan, merumuskan, dan menyusun dokumen kerja sistematis untuk satu tahun anggaran. Tim bertanggung jawab menetapkan target, indikator kinerja, alokasi sumber daya, serta mengevaluasi program agar sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi atau lembaga.
- KETIGA** : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada perundang-undangan, peraturan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 yang dialokasikan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 23 Juli 2026



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kartanegara

Nomor : **B-30/Umtak/900.1.1.2/07/2026**

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN PERSONALIA

- | | | |
|-------|--|--|
| I. | Pengarah | : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| II. | Ketua | : Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| III. | Wakil Ketua | : H. Mu'ajizat Jasmi, S.P |
| IV. | Sekretaris : | : Astuti, S. Sos |
| V. | Sekretariat: | : 1. Denny Wahyudi, S. Sos., M. Si |
| VI. | Bidang Ekonomi dan | : 1. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan
2. H. Agus Wardiansyah, S. Pd., MPH
3. Budi Santoso |
| VII. | Bidang Inovasi dan Tekonlogi | : 1. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi
2. H. Masriel Yunanda, S.H
3. Dayang Arniawati Anni, S.T |
| VIII. | Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Haspian Nur, S.Pd., M.Si
3. Wahyuni, S.P |
| XI. | Bidang Sosial dan Kependudukan | : 1. Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan
2. Muhammad Irmawansyah, S.E
3. M. Subhan Nur, S.H
4. Abijar |



KATA PENGANTAR

Dokumen Rancangan Akhir (Ranhir) Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi landasan strategis bagi Badan Riset Dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelitbangan secara lebih terarah dan efektif, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara “Kutai Kartanegara Idaman Terbaik” dengan Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.”. dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2025-2029.

Rancangan Akhir (Ranhir) Renja merupakan dokumen rencana kerja untuk periode 1 (Satu) tahun yang berisi informasi dan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027.

Dengan adanya Rancangan Akhir (Ranhir) Renja tahun 2027 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja ditahun selanjutnya dan dengan semangat, kerja keras, profesionalisme dan bimbingan Allah SWT akan mencapai target yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : Juli 2026





	DAFTAR ISI
--	------------

Halaman Judul	i
Surat Keputusan Kepala Brista Kab Kutai Kartanegara.....	ii
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT	
DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian	
Renstra PD.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Rumusan Masalah dan Isu Strategis.....	24
2.4 Review Terhadap Rencana Awal dan Renstra PD.....	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	49
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah.....	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
4.1 Program dan Kegiatan.....	53
BAB IV PENUTUP	77



BAB I	P E N D A H U L U A N
--------------	------------------------------

1.1 Latar Belakang

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau Hipotesis di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pengembangan adalah Kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bertujuan memanfaatkan Kaidah dan teori Ilmu Pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi Ilmu Pengetahuan yang telah ada.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2010 Tentang Komite Inovasi Nasional bahwa mengamanatkan kebijakan inovasi nasional di Indonesia perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kesatuan system inovasi nasional guna meningkatkan produktifitas nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa.

Sesuai Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Badan Riset dan Inovasi (Litbang) sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Litbang daerah di arahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama dibidang peneltian dan pengembangan guna membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan/regulasi, penyelenggaraan inovasi daerah, pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Inovasi adalah kegiatan peneltian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Pasal 386 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi sebagai upaya meningkatkan daya saing. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat berasal dari Kepala Daerah, Anggota DPRD Kabupaten, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat.



Kemudian di Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 menyatakan bahwa Brida sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan Pelaksanaan Inovasi.

Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar Institusi Pemerintah Pemerintah Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, dan Masyarakat di Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) mengacu pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang wajib disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029. Rancangan Akhir (Ranhir) Renja disusun sebagai bagian dari perencanaan tahunan Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027.

Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Renja ini penting karena melibatkan penentuan prioritas, program, dan kegiatan yang akan dijalankan, alokasi anggaran, serta target pencapaian yang ingin dicapai dalam satu tahun ke depan. Latar belakang pembuatan Rancangan Akhir (Ranhir) Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu beberapa hal penting meliputi :

1. Amanat Regulasi : Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Renja merupakan kewajiban perangkat daerah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri tentang perencanaan pembangunan daerah. Rancangan Akhir (Ranhir) Renja menjadi dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam program dan kegiatan operasional.
2. Sinkronisasi Perencanaan : Rancangan Akhir (Ranhir) Renja BRIDA harus selaras dengan dokumen perencanaan lain, seperti RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD, serta kebijakan nasional dalam bidang riset dan inovasi. Hal ini memastikan konsistensi arah pembangunan daerah dengan kebijakan pusat.



3. Peran BRIDA dalam Pembangunan Daerah : Badan Riset dan Inovasi Daerah berfungsi sebagai motor penggerak inovasi, penelitian, dan pengembangan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah. RENJA menjadi instrumen untuk merencanakan program riset yang relevan dengan kebutuhan local.
4. Efisiensi dan Efektivitas Program : Dengan adanya Rancangan Akhir (Ranhir) Renja, BRIDA dapat mengatur prioritas kegiatan, alokasi sumber daya, serta indikator kinerja yang terukur. Hal ini penting agar program riset dan inovasi tidak berjalan sporadis, melainkan terarah dan berdampak nyata
5. Tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi : Rancangan Akhir (Ranhir) Renja juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban BRIDA kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga.
6. Menjawab Tantangan Lokal : Kutai Kartanegara memiliki potensi dan tantangan spesifik, baik di bidang sumber daya alam, lingkungan, maupun sosial budaya. Rancangan Akhir (Ranhir) Renja BRIDA disusun untuk mengarahkan riset dan inovasi yang mampu memberikan solusi nyata terhadap isu-isu lokal tersebut

Rancangan Akhir (Ranhir) Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Selama 5 Tahun 2025-2029. Untuk mengantisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan memperhatikan latar belakang ini, Badan Riset dan Inovasi Daerah berkomitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, legislatif, dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Keamanan. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi dan misi.

Rancangan Akhir (Ranhir) Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029, yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.



Melalui Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 disusun untuk dapat mengoptimalkan sistem perencanaan pembangunan daerah agar selaras dan berkesinambungan, dan dapat dijadikan acuan yang berisi program dan kegiatan secara sistematis serta sebagai pedoman dalam memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara terarah dan terukur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagai mana telah ubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Daerah;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
21. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Investasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- 22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- 23. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-13/BAPPEDA/000.7.2/02/2026 Tentang Pedoman Penyusunan (Renja-PD) Tahun 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rancangan Akhir (Ranhir) Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara Periode 2025-2029.

b. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja)Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

- 1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD pada urusan penelitian dan pengembangan,
- 2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan penelitian dan pengembangan,
- 3. Merumuskan program, kegiatan serta evaluasi dan penilaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum



- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 2.4 Inovasi

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB. V. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027
- 5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

BAB VI. PENUTUP



BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
---------------	---

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Capaian Tahun Pertama Renstra

Tahun 2026 (n-1) merupakan tahun berjalan dengan tahun pembuatan rencana kerja tahun 2027 (n), sehingga realisasi capaian target Renja masih sebatas perkiraan. Evaluasi pelaksanaan Renja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output Badan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025, untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan kerja yang telah direncanakan; Sehingga PD dapat mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya, selain itu juga dapat mengetahui program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

Dalam laporan kinerja dapat dilihat dari hal pencapaian yang pertama (i) kinerja output dan yang kedua (ii) kinerja keuangannya. Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kendala kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator masukan (input), Keluaran (output) dan hasil (outcome). Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Sebagai gambaran capaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan Brista Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 terdapat kendala dan hambatan oleh kebijakan. Dalam mendukung Kinerja yang telah ditetapkan dengan tugas dan fungsi BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 melaksanakan 2 (Dua) Program, 12 (Dua belas) Kegiatan dan 45 (Empat puluh lima) Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 17.957.346.099,- Adapun Realisasi sampai akhir tahun program/kegiatan adalah sebesar Rp. 16.263.756.077 atau sebesar 90.57 % .



A. Kondisi khusus realisasi program/kegiatan dengan target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan.

Dengan kondisi yang terjadi saat ini perencanaan berjalan efektif dan realistis dengan kendala yang dapat teratasi, dan pelaksanaan sesuai dengan rencana tanpa deviasi serta indikator kinerja tercapai secara konsisten, namun belum ada capaian tambahan ini menunjukkan jika seluruh program/kegiatan yang direncanakan telah memenuhi target kinerja (tidak ada yang kurang dan tidak ada yang melebihi).

B. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Secara umum target kinerja pada tahun anggaran 2025 tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan walaupun terdapat kendala pada proses pelaksanaan kegiatan terkait dengan isu efesiensi dan rasionalisasi belanja langsung pada Badan Riset dan Inovasi Daerah yang mengakibatkan target waktu yang telah ditetapkan tidak tercapai maksimal, dan akhirnya sebagian kegiatan mundur berakhir pada bulan Desember 2025.

C. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra Brida tahun 2025 – 2029 maka pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan target fisik 100 % dan target keuangan 90.57 %.

Berdasarkan target capaian program pada Renstra tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 secara umum telah memenuhi target capaian program pada Renstra Brida Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja program / kegiatan adalah pengalokasian anggaran kegiatan harus melihat kebutuhan anggaran yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan evaluasi teknis menyesuaikan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan selama satu tahun dalam tahun perencanaan (n-1).



Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2026) maka dibuat tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD tahun 2025 – 2029 (Tabel Terlampir Tabel T-C. 29).



**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan
Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara**

					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target program dan kegiatan (Renja- PD tahun 20.26)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
									Target Renja-PD tahun (2025)	Realisasi Renja-PD tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	71.23	67.03	71.23	67.87	95%	68.71	68.71	96%
5	05	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	11	12	12	100%	2	25	71%
5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	3	3	100%	2	7	70%
5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	8	1	1	100%	0	9	90%
5	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1	6	6	100%	0	7	140%
5	05	01	2.01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5	0	1	1	100%	0	1	20%
5	05	01	2.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	0	1	1	100%	0	1	20%



5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30	7	8	8	100%	9	24	80%
5	05	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1284	1090	1294	1297	100%	2380	4767	371%
5	05	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	0	2	2	100%	1	3	60%
5	05	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	6	4	4	100%	7	17	113%
5	05	01	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	0	1	1	100%	0	1	20%
5	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	25	7	8	8	100%	2	17	68%
5	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	0	1	1	100%	0	1	20%
5	05	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5	0	1	1	100%	0	1	20%
5	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	6	6	6	100%	2	14	140%
5	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1	0	0	0%	0	1	20%
5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	80	30	15	15	100%	0	45	56%
2	05	01	2.05	08	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	5	5	0	0	0%	0	5	100%
2	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	20	10	10	100%	0	30	60%
2	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	5	5	5	100%	0	10	40%
5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	560	174	94	94	100%	4	272	49%
5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	15	3	3	100%	1	19	127%



5	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	5	2	2	100%	1	8	53%
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	2	2	2	100%	1	5	50%
5	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	5	1	1	100%	0	6	60%
5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500	143	48	48	100%	1	192	38%
5	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	3	37	37	100%	0	40	800%
5	05	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5	1	1	1	0%	0	2	40%
5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50	0	1	1	100%	0	1	2%
5	05	01	2.07	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50	0	1	1	100%	0	1	2%
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120	24	24	24	100%	24	72	60%
5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	0%	12	36	60%
5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1255	245	242	242	100%	30	517	41%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	165	33	0	0	0%	0	33	20%
5	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	0	30	30	0%	30	60	200%



5	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1060	212	212	212	100%	0	424	40%
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1. Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan 3. Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	78.90	67.03	77	77	100%	77.37	77.37	98%
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	70	28	7	7	100%	15	50	0%
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5	0	1	1	0%	0	1	20%
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5	6	0	0	0%	8	14	280%
5	05	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	5	3	0	0	0%	0	3	60%
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	5	0	1	1	0%	0	1	20%



					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	5	7	1	1	0%	0	8	160%
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	5	0	0	0	0%	7	7	140%
5	05	02	2.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	5	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	02	2.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	5	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	02	2.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang keuangan dan aset desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang keuangan dan aset desa	5	0	1	1	0%	0	1	20%
5	05	02	2.01	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	5	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	02	2.01	10	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	5	1	1	1	100%	0	2	40%
5	05	02	2.01	11	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	5	0	1	1	0%	0	1	20%
5	05	02	2.01	12	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	5	11	1	1	100%	0	12	240%
5	05	02	2.01	13	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	5	0	0	0	0%	0	0	0%



5	05	02	2.02		Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan	55	16	10	10	100%	11	37	67%
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	5	2	1	1	100%	0	3	60%
5	05	02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	5	1	0	0	0%	0	1	20%
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	5	3	1	1	100%	0	4	80%
5	05	02	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	5	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	5	1	1	1	100%	0	2	40%
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	5	1	0	0	0%	0	1	20%
5	05	02	2.02	07	Penelitian dan Pengembangan PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana	5	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	02	2.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	5	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	5	8	6	6	100%	11	25	500%
5	05	02	2.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	5	0	1	1	100%	0	1	20%
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	60	16	6	6	100%	8	30	50%
5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	5	0	0	0	0%	0	0	0%



5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5	2	0	0	0%	2	4	80%
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5	2	0	0	0%	1	3	60%
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5	7	2	2	100%	5	14	280%
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	5	3	3	3	100%	0	6	120%
5	05	02	2.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya mineral	5	0	1	1	100%	0	1	20%
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	02	2.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	5	1	0	0	0%	0	1	20%
5	05	02	2.03	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	5	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	0	0	0%	0	0	0%
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika	5	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	02	2.04		Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	25	12	15	11	73%	2	25	100%
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5	7	5	2	40%	0	9	180%



5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5	3	2	1	50%	1	5	100%
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5	1	4	4	100%	1	6	120%
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5	1	3	3	100%	0	4	80%
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5	0	1	1	100%	0	1	20%
5	05	03			Program Riset dan Inovasi Daerah	1. Ppersentase produk inovasi yang dimanfaatkan 2. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	90	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	3	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	03	2.01	01	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	3	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Invensi dan Inovasi	12	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	03	2.02	01	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	3	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	03	2.02	02	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	3	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	03	2.02	03	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	3	0	0	0	0%	0	0	0%
5	05	03	2.02	04	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	3	0	0	0	0%	0	0	0%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Penyusunan Renstra PD mengacu pada Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Renstra PD diatur dengan Peraturan penyusunan Renstra Brista ini berpedoman pada Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kebijakan Pembangunan Nasional.

Dalam kondisi umum, pencapaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai organisasi perangkat daerah dengan tolak ukur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di tahun pertama Renstra Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Meningkatnya kualitas dan kebijakan dan daya saing daerah melalui penyelenggaraan riset, inovasi dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dengan indikator yaitu :

- a. Indeks Inovasi Daerah.
- b. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran ditetapkan berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah pada Tahun 2025. Keberhasilan pencapaian sasaran akan diketahui berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan bersamaan dengan penetapan sasaran telah terlaksana.

Adapun sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Badan Riset dan Inovasi Daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:



- a. Meningkatnya pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Daerah dengan indikator Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan.
- b. Meningkatnya pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Daerah dengan Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan

Badan Riset dan Inovasi Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran dengan 4 (empat) indikator yaitu Indeks Inovasi Daerah, Persentase Kebijakan Berbasis Bukti, Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan, Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan. Pencapaian IKU Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel Pencapaian IKU Mengacu Pada Renstra 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	60.61	59.81
2	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	88.38	-
3	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	Persentase	70	-
4	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Renstra 2025-2029) / Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (Renstra 2021-2026)	Persentase	77	77

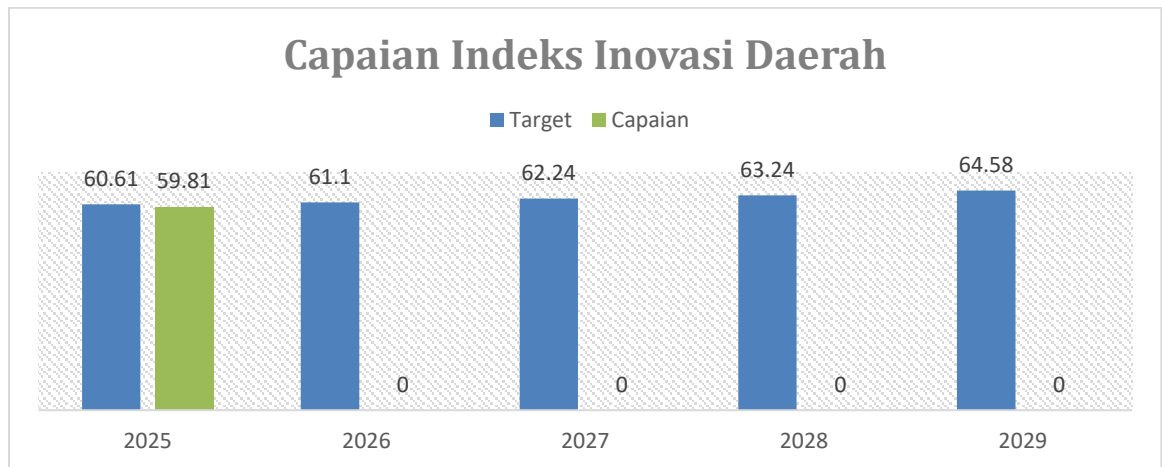
Dari tabel pencapain IKU diatas bahwa semua target yang direncanakan dapat di jelaskan sebagai mana berikut :

1. Indeks Inovasi Daerah.

Berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri IID Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Awal Renstra 2025-2029 dengan skor/angka 59,81 predikat Kabupaten Inovatif, hasil IID dari Kemendagri ini tidak tercapai namun tercapai pada Target Renstra 2021-2026 yang mana



targetnya 52,56 bahkan melampaui target/lebih tinggi, table Renstra 2025-2029 sebagai berikut :



2. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Penetapan Renstra 2025-2026)

Dapat kami jelaskan ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada Renstra 2025-2029 sehingga dalam penyajian data pencapaian Tahun 2025 belum tersedianya data, yang mana ini memang belum dilakukan/dilaksanakan untuk pengukuran persentasenya di tahun 2025.

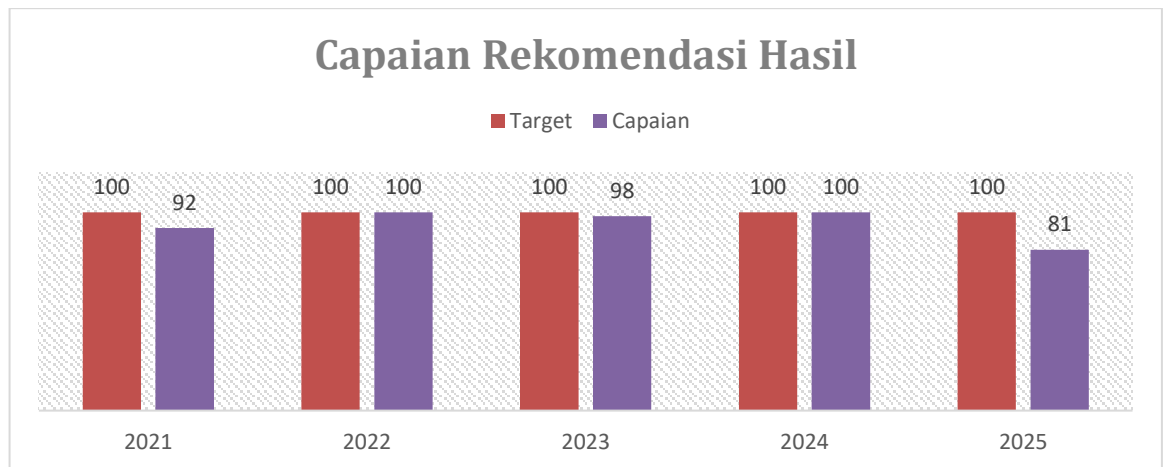
3. Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan (Penetapan Renstra 2025-2026)

Sama halnya seperti pada Indikator 2 (dua) merupakan indikator yang baru ditetapkan pada Renstra 2025-2029 sehingga dalam penyajian data pencapaian Tahun 2025 belum tersedianya data, yang mana ini memang belum dilakukan/dilaksanakan untuk pengukuran persentasenya di tahun 2025.

4. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Renstra 2025-2029) sebelumnya Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (Renstra 2021-2026).



Adapun pelaksanaan untuk penelitian/kajian yang di hasilkan dengan rekomendasi yang di manfaatan sebagai kebijakan pembangunan daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



Pada Indikator sasaran Badan Riset dan Inovasi juga mengampu Indikator Kinerja Kunci yang mana ini ditetapkan pada Renstra 2025-2026 yang di susun pada pada akhir tahun 2025 yaitu “Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan” ini merupakan bagian dari penilaian indicator sasaran yang ke 2 (dua) Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan. Belum bisa tersaji datanya disebabkan dalam proses invetarisasi data dan koordinasi lanjut pada pihak terkait.

Tabel Pencapaian IKK Renstra 2025-2029

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target	Realisasi
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Persentase	70	n.a

Sasaran dan indikator tersebut telah dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dengan capaian kinerja yang dihasilkan Tahun pertama Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut (Tabel Terlampir Tabel T-C. 30).



Tabel TC - 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Indeks Inovasi Daerah (Angka)			60.61	61.10	62.24	63.24	64.58	59.81	-	-	61.10	62.24	
	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Persentase)			88.38	69.75	69.85	69.95	70.15	n.a			69.75	69.85	
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)		Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	70	75	80	85	90	n.a	-	-	75	80	
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)			77	77.37	77.85	78.34	78.90	81	-	-	77.37	77.85	
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah			67.03	68.71	69.55	70.39	71.23	67.87	-	-	68.71	69.55	
3.1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen			7 Dokumen	7 Dokumen	
3.2	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan			7 Laporan	7 Laporan	



3.4	Jumlah Laporan kegiatan Barang Milik Daerah (BMD)			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen			5 Dokumen	5 Dokumen	
3.5	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	
3.6	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum perangkat daerah			6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan			6 Kegiatan	6 Kegiatan	
3.7	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
3.8	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	
3.9	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	
4	Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			88.38	69.75	69.85	69.95	70.15	88.38	-	-	69.75	69.85	
4.1	Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen			13 Dokumen	13 Dokumen	
5	Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			88.38	69.75	69.85	69.95	70.15	88.38	-	-	69.75	69.85	



5.1	Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen			7 Dokumen	7 Dokumen	
6	Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan			88.38	69.75	69.85	69.95	70.15	88.38	-	-	69.75	69.85	
6.1	Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan			11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen			11 Dokumen	11 Dokumen	
7	Persentase produk inovasi yang di manfaatkan (Persentase penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Inovasi dan Teknologi)			90.69	90.79	90.89	90.99	91.09	-	-	-	-	90.89	
7.1	Jumlah hasil riset dan inovasi yang termanfaatkan (Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan)			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-			-	1 Dokumen	
8	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah			90.79	90.89	90.99	91.09	91.19	-	-	-	-	90.99	
8.1	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Inovasi dan Inovasi			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-			-	4 Laporan	



2.3 Rumusan Masalah dan Isu Strategis

- A. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD , Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah bahwa Brida merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dibidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Brida menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan di pemerintah daerah
- c. Perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Riset dan Inovasi, kerjasama pembangunan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan Penelitian,



Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah.

- e. Pelaksanaan program kerja di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah.
 - f. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah.
 - g. Penyusunan laporan rutin dan tahunan di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah
- B. Menentukan permasalahan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan Renja PD, serta capaian kinerja Renstra PD tahun sebelumnya, yaitu :
- 1) Jumlah peneliti dan perencana yang terbatas
Dapat kami lampirkan data bezetting dan kebutuhan berdasarkan data pada Renstra 2025-2029 :

NO	NAMA JFT	BEZETTING							KEBUTUHAN		
		UTAMA	MADYA	MUDA	PERTAMA	PENYELIA	MAHIR	TERAMPIL	UTAMA	MADYA	MUDA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peneliti Ahli Utama								1		
2	Peneliti Ahli Madya		1							5	
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya									2	
4	Perencana Ahli Madya									1	
5	Peneliti Ahli Muda			3							11
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda										2
7	Perencana Ahli Muda			1							1
8	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda										1
9	Psikolog Klinis Ahli Muda										1
10	Peneliti Ahli Pertama				1						
11	Analisis Kebijakan Ahli Pertama										
12	Perencana Ahli Pertama										
13	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama										
14	Psikolog Klinis Ahli Pertama										
15	Arsiparis Ahli Pertama										
16	Arsiparis Penyelia										
17	Arsiparis Mahir										
18	Arsiparis Terampil										

- 2) Sarana dan prasarana riset yang belum memadai



Pada tahun 2025 Bida Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki aset Peralatan dan mesin sesuai dengan KIB B yang mana ini belum tersedianya dalam mengakomodir kebutuhan Labotarium

NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	Barang Inventaris baik dan Rusak Ringan	11.273.238.009,40	1.026 unit
2	Barang Inventaris Rusak Berat	470.535.008,00	86 unit
3	Barang Inventaris tidak ditemukan	0	0 unit
	Total Barang Inventaris	11.743.773.017,40	1.113 unit

sebagai mana penunjang Riset dan Inovasi sebagai berikut :

3) Kurangnya dukungan regulasi

Dalam hal penelitian/kajian perlunya regulasi yang mana saat ini masih dalam proses pembahasan di pansus DPRD terkait Perda Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, capaian program nasional/ internasional, SPM dan MDGs.

Penyebab tidak tercapainya target kinerja utama dan belanja utama Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah akan berdampak kepada Internal maupun eksternal Badan Riset dan Inovasi Daerah , pada analisis risiko terdapat penyebab risiko dan skala risiko sehingga akan menghasilkan area dampak seperti Beban keuangan daerah, Penurunan reputasi, Sanksi pidana, perdata, dan/atau administrasi, Kecelakaan kerja, Gangguan terhadap layanan organisasi dan Penurunan kinerja, dengan Level dampak seperti tidak signifikan (1), minor (2), moderat (3), signifikan (4), sangat signifikan (5).

Untuk mengetahui level dampak tersebut harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi atas pengendalian intern yang telah dibuat seperti pada Surat Instruksi dan Surat Edaran Badan Riset dan Inovasi



Daerah tersebut serta pengendalian yang lain yang mendukung atas evaluasi tersebut.

Dari berbagai opsi penanganan risiko yang telah dipilih memiliki dampak risiko seperti pada surat edaran Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut terdapat area dampak yang harus dilakukan rencana tindak pengendalian yang dibuatkan secara terpisah dari manajemen risiko.

Untuk mencapai tujuan dalam kegiatan dan capaian tujuan organisasi terhadap pemenuhan target yang diperjanjikan perlu dikomunikasi dan dikonsultasikan antar kegiatan dan pimpinan, komunikasi dan konsultasi tersebut dapat berupa :

1. Rapat berkala ;
2. Rapat insidentil ;
3. Focused group discussion ; dan
4. Forum pengelola risiko.
5. Kolaborasi dengan BRIN dan dan pihak lain

D. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah :

1. *Good governance* yang merupakan amanah yang harus dilaksanakan dan implementasikan kepada wujud pelaksanaan yang lebih nyata dan bertanggungjawab;
2. Tuntutan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih 2025-2030 yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029;
3. Tuntutan *stakeholders* terhadap publikasi hasil litbang;
4. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal;
5. Hasil-hasil / *outcome* penelitian yang belum diimplementasikan oleh PD yang ada;
6. Belum tersedianya laboratorium iptek dan riset litbang daerah;



E. Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah :

1. Program dan kegiatan dibidang kelitbangan daerah kedepan dapat dijadikan salah satu dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
2. Program dan kegiatan dibidang kelitbangan daerah kedepan dapat dijadikan salah satu dasar peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID)
3. Program dan kegiatan dibidang kelitbangan daerah kedepan dapat dijadikan salah satu dasar pengambilan kebijakan peningkatan pelayanan pemerintah daerah.

F. Formulasi Isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.

1) **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa.

2) **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan**

Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

3) **Penelitian dan Pengembangan di Sub. Bidang Ekonomi Pembangunan**

Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan.

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan.

4) **Pengembangan Inovasi dan Teknologi**

Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.

Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif.



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal dan Renstra PD

Rancangan akhir RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja PD Tahun 2027. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan PD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel; sehingga aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan salah satu PD yang berperan strategis dalam pemberian rekomendasi terhadap pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan Kutai Kartanegara dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa dan kecamatan juga mengalami perubahan yang nyata.

Akselerasi transformasi penelitian, kajian dan pengembangan di Badan Riset dan Inovasi Daerah akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi penelitian, kajian dan pengembangan di Badan Riset dan Inovasi Daerah membutuhkan sinergitas antara semua PD yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik alokasi anggaran untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya.

Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melihat Badan Riset dan Inovasi Daerah secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.



Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap Review Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 dapat dilihat pada (Tabel TC. 31 terlampir pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah).



Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Kabupaten Kutai Kartanegara

Badan Riset dan Inovasi Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	69.55	Nilai 13,826,994,755	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	69.55	15,045,744,755	
1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Dokumen 750,000,000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	750,000,000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen 450,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	450,000,000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Brida	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan 50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Brida	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	50,000,000	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan 150,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	150,000,000	



1.2	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Brida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50,000,000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Brida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	50,000,000	
1.2.1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	50,000,000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	50,000,000	
1.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Brida	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9	Laporan	11,809,316,355	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Brida	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9	11,809,316,355	
1.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Brida	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1284	Orang / Bulan	11,529,316,355	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Brida	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1284	11,529,316,355	
1.3.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	1	50,000,000	
1.3.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Brida	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan	180,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Brida	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	180,000,000	
1.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Brida	Jumlah Laporan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	50,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Brida	Jumlah Laporan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	50,000,000	
1.4.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Brida	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan	1	Dokumen	25,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Brida	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	25,000,000	



			Barang Milik Daerah SKPD									
1.4.2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	33,626,800	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	33,626,800	
1.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	25,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	25,000,000	
1.5.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	25,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	25,000,000	
1.5.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	180,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	180,000,000	
1.5.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Brida	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Brida	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	100,000,000	
1.5.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Brida	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	80,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Brida	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	105	80,000,000	
1.5.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Brida	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6	Laporan	451,455,237	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Brida	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6	826,455,237	
1.5.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Brida	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	100,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Brida	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	475,000,000	Sebagai upaya mejamin kelancaran operasional dan pelayanan dalam menyediakan sarana kerja sesuai standar untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas pegawai dengan pengadaan Laktop 16 Unit, PC 25 Unit dan Printer 12 Unit
1.5.7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Brida	Jumlah Paket Bahan Logistik	2	Paket	100,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Brida	Jumlah Paket Bahan Logistik	2	100,000,000	



			Kantor yang Disediakan						Kantor yang Disediakan				
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Brida	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	30,200,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Brida	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	30,200,000		
1.6.1	Penyediaan Bahan/Material	Brida	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	45,883,637	Penyediaan Bahan/Material	Brida	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	45,883,637		
1.6.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	Laporan	150,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88	150,000,000		
1.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Brida	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	25,371,600	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Brida	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	25,371,600		
1.7.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Brida	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Laporan	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Brida	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	673,750,000		
1.7.1	-	-	-	-	-	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Brida	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	523,750,000	Mendukung kelancaran tugas dan fungsi pejabat Eselon II sebagai sarana mobilitas resmi dalam melaksanakan kegiatan kedinasan, baik untuk koordinasi, pengawasan, maupun representasi organisasi (Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II, 2000 cc)	
1.7.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Brida	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Paket	57,321,600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Brida	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	150,000,000	Menciptakan kelancaran operasional dan pelayanan dalam kenyamanan suasana kerja untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja dengan pengadaan AC	
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Brida	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Laporan	227,395,728	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Brida	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	227,395,728		



2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Brida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap oran	58,915,728	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Brida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	58,915,728	
2.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap oran	168,480,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Brida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	168,480,000	
2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Brida	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Lap oran	300,200,635	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Brida	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	470,200,635	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	Unit	230,200,635	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	230,200,635	
2.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	87	Unit	70,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	87	240,000,000	Perlunya perawatan/pemeliharaan terjadwal dapat mencegah kerusakan besar, mengurangi biaya tak terduga, serta memastikan lingkungan kerja tetap aman dan efisien dengan perawatan instalasi listrik dan AC serta videotron aula pertemuan
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1. Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan2. Persentase Kebijakan	100	Pers en	Rp 7,214,664,570.00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1. Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan2. Persentase Kebijakan	100	Rp 9,164,664,570.00	



			Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan³. Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan³. Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
2.1.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	13	Dokumen	2,168,210,325	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	15	2,668,210,325	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	Laporan	207,419,614	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	207,419,614	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	Laporan	207,419,614	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	3	707,419,614	Penambahan Paket pekerjaan Kajian pemekaran Desa/Kecamatan di Kab Kukar.



2.1 4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1	Laporan	178,695,349	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1	178,695,349	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	Laporan	128,695,349	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	128,695,349	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1	Laporan	160,325,880	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1	160,325,880	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1	Laporan	163,373,359	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1	163,373,359	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	1	Laporan	160,325,880	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	1	160,325,880	



Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang keuangan dan aset desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang keuangan dan aset desa	1	Laporan	160,325,880	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang keuangan dan aset desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang keuangan dan aset desa	1	160,325,880	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1	Laporan	160,325,880	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1	160,325,880	
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1	Laporan	160,325,880	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1	160,325,880	
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1	Laporan	160,325,880	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1	160,325,880	
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1	Laporan	160,325,880	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1	160,325,880	



	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	1	Laporan	160,325,880	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	1	160,325,880	
	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan	11	Dokumen	2,976,623,213	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan	15	3,476,623,213	
2.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	250,000,000	
2.2.1	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	250,000,000	
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	Dokumen	274,630,927	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	274,630,927	
	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1	Dokumen	274,630,927	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1	274,630,927	
2.2.2	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	Dokumen	274,630,927	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	274,630,927	



	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1	Dokumen	274,630,927	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1	274,630,927	
2.2.3	Penelitian dan Pengembangan PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana	1	Dokumen	274,630,927	Penelitian dan Pengembangan PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana	1	274,630,927	
	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Dokumen	274,630,927	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	274,630,927	
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1	Dokumen	274,630,927	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1	274,630,927	
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1	Dokumen	335,580,526	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	5	835,580,526	Kajian survey layanan dasar wajib Kab Kukar. Kajian Survey IKLI Kab Kukar. Survey Kepuasan dan Ekspektasi Masyarakat Terhadap Program Kukar Idaman Terbaik 2026. Kajian Penguatan indeks persepsi anti korupsi melalui implementasi zona integritas. Survey pemetaan potensi unggulan desa. Indeks Harmoni.
2.2.4	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	1	Dokumen	218,626,198	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	1	218,626,198	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	7	Dokumen	2,069,831,032	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	8	2,819,831,032	



2.2.5	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah			
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Dokumen	425,000,000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	675,000,000	Penambahan Paket pekerjaan terkait Penelitian Pertumbuhan ekonomi makro yang perlu konsisten dalam perencanaan Kab Kukar
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	Dokumen	200,000,000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	200,000,000	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	Dokumen	435,000,000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	935,000,000	Kajian subsidi infut dan output petani/perkebunan penyusunan indeks ketahanan pangan, NTP, NTUP. Survey laju pertumbuhan PDRB
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	Dokumen	445,000,000	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	445,000,000	
2.3	Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya mineral	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya mineral	-	-	-	Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya mineral	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya mineral	-	-	
2.3.1	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	Dokumen	245,043,024	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	245,043,024	



2.3 .2	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1	Dokumen	69,788,008	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1	69,788,008	
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	-	-	-	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	-	-	
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	250,000,000	
	Penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika	-	-	-	Penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika	-	-	
	Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	-	Laporan	-	Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	-	200,000,000	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	-	-	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	200,000,000	Fasilitasi pembangunan Kebun Raya yang berorientasi pada konservasi, penelitian, edukasi, dan rekreasi dengan dukungan SDM, serta kolaborasi yang menjadikan ruang hijau, serta pusat pengetahuan dan pelestarian lingkungan
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi	-	-	-	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	-	-	



			dan Penerapan Teknologi									
2.4	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	-	-	-	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	-	-	
2.4.1	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-	-	-	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-	-	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	-	
	Program Riset dan Inovasi Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Persentase penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Inovasi dan Teknologi 2. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	9	Laporan	2,404,888,185	Program Riset dan Inovasi Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Persentase penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Inovasi dan Teknologi 2. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	9	2,404,888,185	
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	1	Dokumen	389,885,119	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	1	389,885,119	



	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1	Laporan	389,885,119	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1	389,885,119	
	Invensi dan Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Invensi dan Inovasi	4	Laporan	2,015,003,066	Invensi dan Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Invensi dan Inovasi	4	2,015,003,066	
2.4.2	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	1	Laporan	449,225,566	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	1	449,225,566	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1	Laporan	523,275,967	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1	523,275,967	
2.4.3	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	1	Laporan	523,275,967	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	1	523,275,967	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1	Laporan	519,225,566	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1	519,225,566	
				Total		Rp.23,446,547,510				Total	Rp. 26,615,297,510	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja.

Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun PD di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi serta isu-isu aktual dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pada Perda No 1 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019.

Rencana Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah didiskusikan dalam pembahasan Forum PD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten. Dari hasil Musrenbang tersebut belum ada usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. (Tabel terlampir pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah).

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah: Badan Riset dan Inovasi Daerah

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1		Menghadapi tantangan besar berupa lonjakan kebutuhan mobilitas, keterbatasan infrastruktur, pendanaan, koordinasi antar lembaga, serta dampak lingkungan dan keselamatan. Semua faktor ini harus diintegrasikan dalam perencanaan agar sistem				1 Dokumen	Paket Pekerjaan: Studi Perencanaan Transportasi a. Rencana Induk Transportasi Daerah (RITD / Masterplan Transportasi, Integrasi moda darat sungai dan logistic, Proyeksi kebutuhan transportasi 20 tahun) b. Studi Jaringan Transportasi



		transportasi tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif					(Pola jaringan jalan, Hierarki jalan, Integrasi terminal pelabuhan dan simpul transportasi) c. Model Permintaan Transportasi (Origin Destination (OD Matrix), Model perjalanan masyarakat, Prediksi pertumbuhan kendaraan)
2		Menghadapi tantangan berupa kemacetan, keterbatasan infrastruktur, lemahnya transportasi publik, penegakan hukum yang tidak konsisten, dampak lingkungan, serta keselamatan pengguna jalan				1 Dokumen	Paket Pekerjaan: Studi Manajemen Lalu Lintas a. Studi Rekayasa Lalu Lintas (Manajemen simpang, Sistem satu arah, Manajemen parkir, Optimasi lampu lalu lintas) b. Studi Kinerja Jalan (Parameter yang dianalisis : Volume lalu lintas, Derajat kejenuhan (DS), Level of Service (LOS), Metode biasanya mengacu pada MKJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia)). c. Studi Dampak Lalu Lintas (Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Wajib untuk pembangunan mall, SPBU, kawasan industri, dll)
3		Menghadapi tantangan berupa jangkauan layanan yang terbatas, kualitas armada yang rendah, pendanaan yang tidak berkelanjutan, persaingan dengan kendaraan pribadi, lemahnya koordinasi, dampak lingkungan, serta isu keselamatan				1 Dokumen	Paket Pekerjaan: Studi Angkutan Umum a. Studi Kelayakan Trayek (Penentuan rute, Jumlah armada, Load factor) b. Studi Kebutuhan Angkutan Sekolah (Rute aman siswa, Potensi kecelakaan, Pola perjalanan pelajar) c. Studi Integrasi Angkutan (Integrasi terminal, integrasi angkutan kota bus dan sungai)
4		Menghadapi tantangan berupa tingginya angka kecelakaan, keterbatasan infrastruktur keselamatan, lemahnya transportasi publik, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta adaptasi terhadap teknologi baru				1Dokumen	Paket Pekerjaan: Studi Keselamatan Transportasi. Studi Daerah Rawan Kecelakaan (Identifikasi Blackspot, Identifikasi Blacksites)b. Audit Keselamatan Jalan (Audit desain jalan, Audit operasional jalan)c. Studi Manajemen Kecepatan (Penentuan batas kecepatan, Traffic calming)
5		Menghadapi tantangan berupa tingginya emisi, keterbatasan infrastruktur hijau, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pendanaan, serta lambatnya adopsi teknologi ramah lingkungan				1 Dokumen	Paket Pekerjaan: Studi Transportasi Berbasis Lingkungan a. Studi Emisi Transportasi (Dampak kendaraan terhadap polusi udara) b. Studi Transportasi Ramah Lingkungan (kendaraan listrik, jalur sepeda, pedestrian)
6		Menghadapi tantangan berupa kapasitas terbatas, kondisi fisik yang menurun, ketimpangan wilayah, keterbatasan pendanaan, lemahnya koordinasi, dampak lingkungan, keselamatan, serta adaptasi teknologi				1 Dokumen	Paket Pekerjaan: Studi Infrastruktur Transportasi a. Studi Terminal (lokasi terminal, kapasitas terminal, desain terminal) b. Studi Parkir (kebutuhan parkir kota, parkir tepi jalan, parkir khusus) c. Studi Pelabuhan Sungai (Sangat relevan untuk wilayah sungai seperti Mahakam, kebutuhan dermaga, rute angkutan sungai, integrasi logistik sungai)
7		Menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, fragmentasi sistem, pendanaan, keamanan data, kesiapan SDM, adaptasi masyarakat, serta regulasi yang belum matang				1 Dokumen	Paket Pekerjaan: Studi Digitalisasi Transportasi a. Studi ITS (Intelligent Transport System) (ATCS (Area Traffic Control System), CCTV lalu lintas, manajemen data lalu lintas) b. Studi Sistem Informasi Transportasi (aplikasi transportasi daerah, dashboard monitoring transportasi)



8		Menghadapi tantangan berupa biaya tinggi, ketergantungan subsidi, ketidakseimbangan permintaan-penawaran, externalities, ketimpangan wilayah, efisiensi rendah, serta keterbatasan pendanaan alternatif				1 Dokumen	Paket Pekerjaan: Studi Ekonomi Transportasi a. Studi Potensi Retribusi Transportasi (Contoh: parkir, terminal, pengujian kendaraan bermotor (KIR)) b. Studi Tarif Transportasi (tarif angkutan umum, tarif parkir) c. Studi Model Kerjasama Investasi (KPBU transportasi, kerjasama pengelolaan terminal)
9		Menghadapi tantangan berupa infrastruktur terbatas, biaya distribusi tinggi, ketidakseimbangan wilayah, lemahnya koordinasi, dominasi moda tertentu, dampak lingkungan, keterlambatan distribusi, serta isu keamanan				1Dokumen	Paket Pekerjaan: Studi Logistik dan Transportasi Baranga. Studi Rantai Logistik (jalur distribusi barang, simpul logistic)b. Studi Angkutan Barang (tonase kendaraan, jalur khusus truk)
10		Perlunya dasar sebagai penyusunan kebijakan daerah dengan melihat kondisi wilayah Kukar, studi yang paling strategis adalah: Studi Transportasi Sungai Mahakam, Angkutan Sekolah Kabupaten Kukar, Potensi PAD Parkir Dishub, Blackspot Kecelakaan Kukar, Smart Traffic System Tenggarong, Logistik Pelabuhan Sungai				1 Dokumen	Paket Pekerjaan: Studi Kebijakan dan Regulasi Transportasi a. Penyusunan Perda Transportasi b. Kajian Penataan Parkir c. Kajian Zona Transportasi
11		Menghadapi tantangan berupa pendanaan, manajemen, lokasi, regulasi, risiko keamanan, partisipasi, dampak lingkungan, serta dukungan teknologi. Semua aspek ini harus dianalisis secara komprehensif agar event dapat berjalan efektif, aman, dan memberikan manfaat sesuai tujuan				1 Dokumen	Paket Pekerjaan: Studi Kelayakan Event (Event Feasibility Study).
12		Menghadapi tantangan berupa kualitas perairan, sedimentasi, ketersediaan pakan alami, konflik pemanfaatan ruang, aspek ekologi, keterbatasan infrastruktur, serta regulasi yang belum optimal. Semua faktor ini harus dianalisis secara holistik agar budidaya kerang dara dapat berjalan efisien, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem maupun masyarakat sekitar				1 Dokumen	Paket Pekerjaan: Kajian Kesesuaian Area Budidaya Kerang dara di perairan Muara Badak
13		Fluktuasi kualitas air, risiko penyakit ikan, sedimentasi dan polusi, degradasi ekosistem, konflik pemanfaatan ruang, keterbatasan infrastruktur uji, lemahnya koordinasi, serta regulasi yang belum optimal. Semua faktor ini harus dianalisis agar pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di Sungai Mahakam dapat berjalan berkelanjutan, aman, dan produktif				1 Dokumen	Paket Pekerjaan: Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kab /Kota - Kegiatan : Uji Kandungan Fisika, Kimia biologi pada ikan yang di budidayakan di perairan sungai mahakam (kesling)
14		Menghadapi tantangan berupa kualitas lingkungan yang fluktuatif, sedimentasi, keterbatasan benih dan pakan, konflik pemanfaatan ruang, minimnya infrastruktur, risiko penyakit, serta regulasi yang belum optimal. Semua faktor ini harus dianalisis secara holistik agar budidaya				1Dokumen	Paket Pekerjaan: Study Budidaya Kepiting di daerah pesisir kabupaten Kutai Kartanegara



		kepingan dapat berjalan efisien, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir					
15		Menghadapi tantangan berupa pendataan yang lemah, sistem pengelolaan manual, parkir liar, regulasi yang belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta koordinasi antar pihak. Semua faktor ini harus dianalisis agar kebijakan parkir dapat menjadi sumber PAD yang transparan, berkelanjutan, dan efektif				1 Dokumen	Paket Pekerjaan : Studi Potensi PAD Parkir Dishub
16		Menghadapi tantangan berupa infrastruktur terbatas, sedimentasi, kapasitas armada kecil, koordinasi lemah, efisiensi rendah, dampak lingkungan, risiko keselamatan, serta keterhubungan pasar yang belum optimal. Semua faktor ini harus dianalisis agar pelabuhan sungai dapat berfungsi sebagai simpul logistik yang efisien, berkelanjutan, dan mendukung ekonomi daerah.				1 Dokumen	Paket Pekerjaan : Studi Logistik Pelabuhan Sungai
17		Menghadapi tantangan berupa data yang tidak valid, fragmentasi antar instansi, keterbatasan teknologi, rendahnya partisipasi pelaku, lemahnya koordinasi, pemutakhiran yang jarang, serta keterbatasan pendanaan dan SDM. Semua faktor ini harus diatasi agar basis data UMKM dapat menjadi alat perencanaan ekonomi daerah yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan				1 Dokumen	Paket Pekerjaan : Pendataan Pelaku UMKM dan Manajemen Basis Data UMKM



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Berdasarkan telaahan terhadap arah kebijakan nasional dan substansi Rancangan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat disimpulkan bahwa pembangunan daerah telah dirancang selaras dengan prioritas pembangunan nasional, terutama dalam mendorong transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan dan energi, reformasi birokrasi berbasis digital, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keselarasan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional, sehingga tercipta sinergi antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Posisi strategis Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara memberikan peluang besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, namun sekaligus menghadirkan tantangan yang tidak ringan, seperti kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia yang kompetitif, penguatan ketahanan sosial masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, arah pembangunan daerah tahun 2027 perlu difokuskan pada penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal, diversifikasi struktur ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor ekstraktif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang semakin dinamis.

Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak kebijakan berbasis riset dan data (evidence-based policy). Melalui penyediaan kajian ilmiah, pengembangan inovasi perangkat daerah, penguatan sistem data terintegrasi, serta fasilitasi kolaborasi dengan perguruan tinggi dan dunia usaha, BRIDA diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat, terukur, dan responsif terhadap berbagai isu pembangunan. Peran ini menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan didukung oleh analisis yang komprehensif serta inovasi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.



Semua ini merupakan fondasi kuat bagi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan dukungan riset, inovasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, memperkuat daya saing daerah dalam skala regional dan nasional, serta menjaga keberlanjutan lingkungan demi terwujudnya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera, berbahagia, dan mandiri.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara 2025 s/d 2029

***“TERWUJUDNYA FONDASI PUSAT PANGAN, PARIWISATA DAN
INDUSTRI HIJAU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN
BERKELANJUTAN”***

Adapun Misi Kab. Kutai Kartanegara yaitu sebagai berikut :

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif.
3. Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara
4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan

Sasaran yang ingin dicapai BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara terkait Misi ke 3 (Tiga) Kukar Idaman Terbaik yaitu “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara” sampai lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan Berkarakter.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan Tujuan dan Sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran beserta dengan target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029, diketahui bahwa tujuan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah



“**Meningkatnya kualitas kebijakan dan daya saing daerah melalui penyelenggaraan riset, inovasi, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti**”, dengan indikator tujuan, yaitu:

- 1. Indeks Inovasi Daerah
- 2. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka BRIDA menetapkan sasaran strategis, yaitu “**Meningkatnya pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Daerah**”, dengan indikator sasaran, yaitu:

- 1. Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan
- 2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan.

Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) merupakan bagian konsep berkesinambungan (integral), tak terpisahkan dari suatu proses perencanaan strategik. Sasaran fokusnya pada *action*, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur serta dapat diwujudkan dengan gambaran sebagai berikut :

VISI (RPJMD)	:	“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”		
MISI (RPJMD)*	:	3) Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas kebijakan dan daya saing daerah melalui penyelenggaraan riset, inovasi, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pembentukan Perda Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah	Penguatan komitmen pemangku kepentingan penetapan Perda penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah
			Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil Riset sebagai layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan penyelesaian pembangunan berkelanjutan	Peningkatan desiminasi dan pemahaman tentang manfaat hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan, secaraintensif
		Meningkatnya Kualitas		Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi melalui penguatan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha



	Pelayanan Publik	Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan serta bimtek berbasis spesifik/tematik.	Peningkatan Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas hasil Riset dan Inovasi
			Peningkatan Kapasitas (kuantitas dan kualitas) Peneliti
			Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan
			Melaksanakan Kerja sama Riset dan Inovasi dengan lembaga/ intitusi/yayasan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****4.1 Program dan Kegiatan****a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidah –kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Provinsi, Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara yaitu Program Kegiatan Pembangunan melalui Kutai Kartanegara Inovatif, Daya Saing, dan Mandiri (Kukar Idaman Terbaik), RPJMD, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam menyusun program dan kegiatan Brista Tahun 2027 tetap memperhatikan upaya – upaya **Meningkatnya kualitas kebijakan dan daya saing daerah melalui penyelenggaraan riset, inovasi, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti** dengan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Persentase Kebijakan Berbasis Bukti Serta Meningkatkan pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Daerah dengan Indikator Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan dan Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2027 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 23.503.869.110.48,- adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dengan Pagu indikatif sebesar Rp. 13.857.717.695,-.
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Pagu dana indikatif sebesar Rp 800.000.000,-
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Pagu dana indikatif sebesar Rp 11.529.316.355,48,-
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
Pagu dana indikatif sebesar Rp 86.126.800,-
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Pagu dana indikatif sebesar Rp 180.000.000,-
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Pagu dana indikatif sebesar Rp 451.455.237,-
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



Pagu dana indikatif sebesar Rp 57.321.600,-

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pagu dana indikatif sebesar Rp 227.395.728,-

- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pagu dana indikatif sebesar Rp 300.200.635,-

- 2) Program Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari 3 (Tiga) Kegiatan dengan Pagu indikatif sebesar Rp. 7.155.000.000,-.

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Pagu dana indikatif sebesar Rp 2.168.210.590,-

- b. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan.

Pagu dana indikatif sebesar Rp 2.976.623.213,-

- c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Pagu dana indikatif sebesar Rp 2.069.831.032,-

- 3) Program Riset dan Inovasi Daerah yang terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dengan Pagu indikatif sebesar Rp. 2.404.888.185,-.

- a. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.

Pagu dana indikatif sebesar Rp 389.885.119,-

- b. Inovasi dan Inovasi

Pagu dana indikatif sebesar Rp 2.015.003.006,-

(Terlampir Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 pada Tabel T-C. 33)



Tabel TC. 33

Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

OPD : Riset dan Inovasi Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Brida	93 NILAI	13,857,717,695	APBD		95 NILAI	11,884,800,317
5	05	01	2.01		Perencanaan Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	7 Dokumen	750,000,000	APBD		7 Dokumen	270,000,000
					PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Brida	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	-
					PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	-



5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	3	Dokumen	450,000,000	APBD		3	Dokumen	100,000,000
5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Brida	1	Laporan	50,000,000	APBD		1	Laporan	100,000,000
5	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	1	Laporan	150,000,000	APBD		1	Laporan	70,000,000
5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Brida	7	Laporan	10,978,510,858	APBD		7	Laporan	10,013,343,480
5	05	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Brida	76	Orang / Bulan	10,781,720,858	APBD		76	Orang / Bulan	9,866,553,480
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Brida	1	Laporan	25,000,000	APBD		0	Dokumen	-
5	05	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Brida	6	Laporan	146,790,000	APBD		6	Laporan	146,790,000
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Brida	0	Dokumen	25,000,000	APBD		0	Laporan	-



5	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Brida	4	Dokumen	105,000,000	APBD		7	Dokumen	50,000,000
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Brida	1	Dokumen	25,000,000	APBD		0	Dokumen	-
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Brida	1	Laporan	50,000,000	APBD		0	Laporan	-
5	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	2	Laporan	30,000,000	APBD		6	Laporan	50,000,000
5	05	01	2.03	06	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	0	Laporan	-	APBD		1	Laporan	-
5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Brida	6	Dokumen	155,000,000	APBD		6	Dokumen	155,000,000
2	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Brida	10	Orang	95,000,000	APBD		10	Orang	95,000,000
2	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Brida	5	Orang	60,000,000	APBD		5	Orang	60,000,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Brida	1	Unit	287,750,000	APBD				287,750,000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Brida	1	Paket	287,750,000					287,750,000



5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan administrasi umum	Brida	7	Pelayanan	576,647,962	APBD		7	Pelayana n	576,647,962
5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Brida	3	Paket	135,000,000	APBD		3	Paket	135,000,000
5	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Brida	2	Paket	124,450,000	APBD		2	Paket	124,450,000
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Brida	2	Paket	30,002,325	APBD		2	Paket	30,002,325
5	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Brida	2	Paket	45,883,637	APBD		2	Paket	45,883,637
5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Brida	88	Laporan	149,992,000	APBD		88	Laporan	149,992,000
5	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Brida	37	Dokumen	61,320,000	APBD		37	Dokumen	61,320,000
5	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Brida	1	Dokumen	30,000,000	APBD		1	Dokumen	30,000,000
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Brida	12	Bulan	684,808,875	APBD		12	Bulan	684,808,875
5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Brida	12	Laporan	58,915,728	APBD		12	Laporan	58,915,728
5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Brida	12	Laporan	625,893,147	APBD		12	Laporan	625,893,147



5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Brida	242	Unit	320,000,000	APBD		242	Unit	135,000,000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Brida	30	Unit	250,000,000	APBD		30	Unit	-
5	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Brida	0	Unit	-	APBD		31	Unit	65,000,000
5	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Brida	212	Unit	70,000,000	APBD		212	Unit	70,000,000
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1. Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan 3. Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan 4. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	100	Persen	Rp 7,155,000,000.00	APBD		100	Persen	Rp 1,490,000,000.00



5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	8	Laporan	1,050,000,000	APBD		1	Dokumen	125,000,000
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Laporan	150,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Laporan	250,000,000	APBD		-	-	-
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Laporan	150,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang keuangan dan aset desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang keuangan dan aset desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Laporan	150,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Dokumen	100,000,000	APBD		-	-	-



					Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Rekomendasi	200,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Laporan	50,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.02		Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan	Kabupaten Kutai Kartanegara	7	Dokumen	1,475,000,000	APBD		2	Dokumen	1,115,000,000
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Dokumen	150,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Dokumen	750,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Dokumen	75,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	4	Dokumen	500,000,000	APBD		1	Dokumen	1,000,000,000
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	6	Dokumen	1,025,000,000	APBD		1	Dokumen	125,000,000



5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Dokumen	300,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kutai Kartanegara	3	Dokumen	625,000,000	APBD		-	-	-
	05	02	2.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya mineral	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Dokumen	100,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.04		Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	13	Dokumen	3,605,000,000	APBD		1	Laporan	125,000,000
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Dokumen	400,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Laporan	1,800,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kabupaten Kutai Kartanegara	4	Laporan	875,000,000	APBD		-	-	-



5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	3	Laporan	230,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Laporan	300,000,000	APBD		1	Laporan	125,000,000
Total Pagu										Rp 21,012,717,695	APBD				Rp 13,374,800,317



c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Rumusan Program dan Kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2027 masih menggunakan formulasi awal namun ada penambahan berdasarkan analisis kebutuhan yang sesuai dengan Renstra tahun 2025 – 2029. Sehingga terdapat perubahan pada hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Brida Tahun 2027.

d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Sebagai mana Format Tabel Berikut :

No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip Perangkat Daerah	69.55 Nilai	15.045.744.755
1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	750,000,000
1.1.1	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Brida	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50,000,000
1.1.2	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Brida	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50,000,000
1.1.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450,000,000
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Brida	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50,000,000
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150,000,000



1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Brida	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 Laporan	11.809.316.355,48
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Brida	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.284 Orang	11.529.316.355
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Brida	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.,000,000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Brida	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	180.000,000
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Brida	Jumlah Laporan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50,000,000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5 Dokumen	108.626,800
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Brida	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,000,000
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Brida	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	33.626.800
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	25.000.000
1.3.3	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	180,000,000
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Brida	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	100,000,000
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Brida	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	105 Orang	80,000,000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Brida	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6 Laporan	451.455.237
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Brida	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	475,000,000
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Brida	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Brida	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30,200,000
1.5.4	Penyediaan Bahan/Material	Brida	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	45,883,637
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 Laporan	150,000,000



1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Brida	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	25,371,600
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Brida	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	673.750.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Brida	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	523.750.000
1.6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Brida	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	57,321,600
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Brida	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	227,395,728
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Brida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58,915,728
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Brida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	168,480,000
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Brida	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	470,200,635
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Brida	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	230,200,635
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Brida	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	212 Unit	240,000,000
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan 3. Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	Rp 9,164,664,570.00
2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pemanfaatan hasil kelitbang dalam perencanaan pembangunan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	13 Dokumen	2,168,210,325
2.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	207,419,614.00



2.1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	3 Laporan	707,419,614.00
2.1.3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	178,695,349
2.1.4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	128,695,349.00
2.1.5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1 Laporan	160,325,880.00
2.1.6	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Laporan	163,373,359.00
2.1.7	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	1 Laporan	160,325,880.00
2.1.8	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang keuangan dan aset desa	1 Laporan	160,325,880.00
2.1.9	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	160,325,880.00
2.1.10	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Dokumen	160,325,880.00
2.1.11	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1 Dokumen	160,325,880.00
2.1.12	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	160,325,880.00
2.1.13	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	1 Laporan	160,325,880.00
2.2	Penelitian dan pengembangan daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan	15 Dokumen	3,476,2623,213
2.2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	250,000,000.00
2.2.2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	250,000,000.00



2.2.3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	274,630,927.00
2.2.4	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen	274,630,927.00
2.2.5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	274,630,927.00
2.2.6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	274,630,927.00
2.2.7	Penelitian dan Pengembangan PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	274,630,927.00
2.2.8	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	274,630,927.00
2.2.9	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	274,630,927.00
2.2.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	5 Dokumen	835,580,526.00
2.2.11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	1 Dokumen	218,626,198.00
2.3	Penelitian dan pengembangan daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	8 Dokumen	2,819,831,032
2.3.1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Dokumen	675,000,000.00
2.3.2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	200,000,000.00
2.3.3	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Panga	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	935,000,000.00
2.3.4	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	445,000,000.00
2.3.5	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	245,043,024.00
2.3.6	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	69,788,008.00
2.3.7	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	250,000,000.00
	Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	200.000.000
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	200.000.000



3	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Persentase penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Inovasi dan Teknologi 2. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	100 Persen	Rp 2,404,888,185
3.1	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	1 Dokumen	389,885,119.00
3.1.1	Pemantauan dan Evaluasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	1 Dokumen	389,885,119.00
3.2	Invensi dan Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Invensi dan Inovasi	4 Laporan	2,015,003,066.00
3.2.1	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	449,225,566.00
3.2.2	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1 Laporan	523,275,967.00
3.2.3	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	1 Laporan	523,275,967.00
3.2.4	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	519,225,566.00
				Total	26.506.670.710



BAB IV KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Peran BRIDA semakin strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, inovatif, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*), sehingga setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar ilmiah yang kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara menuju daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing, BRIDA berperan sebagai *knowledge hub* pemerintah daerah yang menghasilkan penelitian, kajian, rekomendasi kebijakan, serta inovasi daerah yang mampu menjawab berbagai isu strategis pembangunan. Fungsi tersebut tidak hanya menghasilkan dokumen hasil penelitian, tetapi juga memastikan bahwa hasil riset dan inovasi dimanfaatkan secara nyata oleh perangkat daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, BRIDA menetapkan dua Indikator Kinerja Utama pada level tujuan, yaitu **Indeks Inovasi Daerah** dan **Persentase Kebijakan Berbasis Bukti**.

Indeks Inovasi Daerah menjadi indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan inovasi daerah secara menyeluruh, meliputi aspek tata kelola inovasi, budaya inovasi, kapasitas kelembagaan, dukungan regulasi, kolaborasi, serta keberhasilan implementasi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada Tahun 2027 ditargetkan nilai Indeks Inovasi Daerah mencapai **62,24**, yang diharapkan mampu mempertahankan predikat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah yang sangat inovatif sesuai penilaian Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, indikator **Persentase Kebijakan Berbasis Bukti** ditargetkan mencapai **69,85 persen** pada Tahun 2027. Indikator ini menunjukkan tingkat pemanfaatan hasil penelitian, kajian, data statistik, evaluasi program, maupun rekomendasi ilmiah dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Peningkatan indikator ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang



lebih efektif, tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan daerah.

Pada tingkat sasaran perangkat daerah, BRIDA menetapkan indikator **Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan** dengan target **80 persen**. Indikator tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa produk inovasi yang dihasilkan tidak berhenti pada proses penciptaan, tetapi telah dimanfaatkan oleh perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemanfaatan inovasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi pelaksanaan program pembangunan, serta meningkatkan daya saing daerah.

Selain itu, indikator **Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan** ditargetkan mencapai **77,85 persen**. Indikator ini menggambarkan tingkat kebermanfaatan hasil penelitian dan kajian BRIDA dalam mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, maupun pengambilan keputusan strategis pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan rekomendasi kebijakan, semakin besar kontribusi BRIDA dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis data, informasi, dan bukti ilmiah.

Pencapaian seluruh indikator tersebut didukung melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, antara lain penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah, penguatan sistem inovasi daerah, fasilitasi dan pembinaan inovasi perangkat daerah, pengembangan jejaring kolaborasi riset dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, komunitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang riset dan inovasi. Di samping itu, BRIDA juga mendorong implementasi hasil riset dan inovasi melalui proses hilirisasi, replikasi inovasi, pendampingan perangkat daerah, serta penguatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil kelitbangan.

Secara keseluruhan, indikator kinerja BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 menunjukkan arah pembangunan yang semakin menitikberatkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis riset dan inovasi. Melalui pencapaian Indeks Inovasi Daerah, peningkatan kebijakan berbasis bukti, optimalisasi pemanfaatan produk inovasi, serta peningkatan penggunaan rekomendasi kebijakan dalam pembangunan, BRIDA diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, penguatan daya saing Kabupaten Kutai Kartanegara, serta mendukung terwujudnya tujuan



pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian sasaran **"Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah"**, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** yaitu **Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program/Kegiatan**.

Indikator ini dipilih karena tidak hanya mengukur jumlah inovasi yang dihasilkan, tetapi lebih menekankan pada tingkat implementasi dan keberlanjutan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberhasilan inovasi tidak cukup diukur dari penciptaannya, melainkan dari sejauh mana inovasi tersebut telah diadopsi oleh perangkat daerah, diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan, serta memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kinerja organisasi, kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pada Tahun 2027, BRIDA menargetkan capaian indikator sebesar **70 persen**, yang berarti sedikitnya 70 persen perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerapkan inovasi yang menjadi bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah masing-masing. Target tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membangun budaya inovasi yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang adaptif, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Pencapaian target 70 persen akan didukung melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan berbagai strategi, antara lain pendampingan penyusunan inovasi perangkat daerah, fasilitasi implementasi hasil inovasi, pembinaan dan peningkatan kapasitas inovator, penguatan jejaring kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan lembaga penelitian, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap keberlanjutan inovasi yang telah diterapkan.

Indikator ini juga memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis BRIDA yaitu **"Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah."** Semakin banyak perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi secara berkelanjutan dalam program dan kegiatannya, maka semakin tinggi tingkat pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah. Dengan demikian, indikator ini menjadi ukuran yang lebih representatif terhadap dampak nyata inovasi dalam



mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Melalui indikator ini, BRIDA tidak hanya mendorong lahirnya inovasi baru, tetapi juga memastikan bahwa inovasi tersebut memberikan manfaat nyata, berkelanjutan, dapat direplikasi, serta menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah dan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator Kunerja Utama (IKU)	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian				
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
TUJUAN												
1	Indeks Inovasi Daerah (Angka)		60.61	61.10	62.24	63.24	64.58	59.81	-	-	-	-
2	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Persentase)		88.38	90	90	90	90	-	-	-	-	-
SASARAN												
3	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	70	75	80	85	90	-	-	-	-	-
4	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)		77	77.37	77.85	78.34	78.90	77	-	-	-	-

Penjelasan untuk Indikator Kinerja Utama :

1. Penilaian Indeks Inovasi Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Indeks Inovasi Daerah (IID) Provensi, Kabupaten, dan Kota tiap tahun dengan memberi penilaian untuk skor indeks dan predikatnya.

Dengan metode penilaian :

Skor Total = ISP + rata-rata ISI

$ISP = \sum_{i=1}^{16} Skor\ Indikator\ Satuan\ Pemda\ ke\ i$

$Rata-rata\ ISI = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{f=17}^{36} Sokor\ Indikator\ Satuan\ Inovasi\ ke\ i\ Inovasi\ ke\ j}{n}$



n adalah jumlahInovasi daerahsatu Pemerintah Daerah
i adalah nomor indicator
j adalah nomor inovasi
ISP adalah Indokator Satuam Pemda
ISI adalah Indikator Satuan Inovasi

$$IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

Skor dan Predikat	:	Sangat Inovatif	: 60.00 – 100.00
	:	Inovatif	: 30.00 – 59.99
	:	Kurang Inovatif	: 0.01 – 29.99
	:	Tidak Dapat nilai	: 0

2. Rumus perhitungan **Persentase Kebijakan Berbasis Bukti** adalah :

$$\frac{\text{Jumlah kebijakan yang disusun berdasarkan hasil kajian/data/riset}}{\text{Total jumlah kebijakan yang disusun}} \times 100 \%$$

- **Pembilang** = jumlah kebijakan yang dalam proses penyusunannya menggunakan :
 - hasil penelitian,
 - kajian,
 - rekomendasi ilmiah,
 - data statistik,
 - evaluasi program,
 - evidence based policy.
- **Penyebut** = seluruh kebijakan yang disusun pada periode tertentu.

3. Rumus perhitungan **Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan** adalah:

$$\frac{\text{Jumlah produk inovasi yang telah dimanfaatkan/diterapkan}}{\text{Total produk inovasi yang dihasilkan}} \times 100 \%$$

- **Pembilang** = jumlah produk inovasi yang :
 - telah digunakan,
 - diterapkan,
 - dimanfaatkan oleh perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, atau pihak lain.
- **Penyebut** = seluruh produk inovasi yang dihasilkan dalam periode tertentu.

4. Rumus perhitungan **Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan** adalah:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang digunakan sebagai landasan implementasi pembangunan}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100 \%$$

- **Pembilang** = jumlah rekomendasi kebijakan yang :
 - digunakan dalam penyusunan program/kegiatan,
 - dijadikan dasar pengambilan keputusan,
 - dimuat dalam dokumen perencanaan,
 - atau diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- **Penyebut** = seluruh rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dihasilkan pada periode tertentu.

Perhitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

$$\text{Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi} =$$



$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yg menerapkan inovasi dan telah terintegrasi dalam program/kegiatan}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

- **Pembilang:** Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan minimal satu inovasi dan inovasi tersebut telah menjadi bagian dari program/kegiatan yang dilaksanakan.
- **Penyebut:** Jumlah seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah

Rancangan Akhir (Ranhir) Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 ini merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Adapun proses penyusunan RKPD Tahun 2027 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah, maka dengan beberapa catatan dan perhatian sebagai berikut :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan dibutuhkan dalam kurun waktu selama 6 bulan mulai dari penyusunan pengelola administrasi kegiatan sampai dengan laporan akhir kegiatan. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka kegiatan kelitbangan akan mengambil kegiatan yang sangat prioritas dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Bripda.

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dibutuhkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Judul kegiatan berdasarkan Indea konsep paper (ICP)
2. Dilanjutkan dengan Pembuatan Kerangka Acuan Kegiatan.
3. Pembuatan Rencana Kerja Anggaran.
4. Pembuatan Dokumen Perencanaan Anggaran.
5. Pembuatan SK Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
6. Pembuatan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
7. Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan.
8. Penunjukan/penetapan Tenaga Ahli/Peneliti.
9. Pengajuan Proposal.
10. Kesepakatan Kerjasama Kegiatan.
11. Pelaksanaan Kegiatan (Seminar Pendahuluan, Pengambilan Data, Pembuatan Draft Laporan Hasil, Laporan Hasil, Seminar Hasil, Laporan Akhir).
12. Penyampaian Rekomendasi Ke Pemangku Kepentingan.

- c. Rencana tindak lanjut

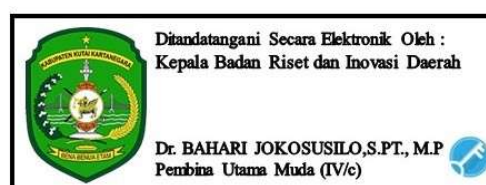
Adapun langkah tindak lanjut yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai Berikut :

1. Menampilkan usulan Program dan Kegiatan serta sub Kegiatan yang bersumber dari Pemangku Kepentingan;

2. Memperbaiki uraian-uraian dan tata naskah yang belum sesuai substansi Renja 2027 antara lain, memperbaiki Landasan Hukum Peraturan Perundangan yang telah tidak sesuai;
3. Membuat Surat Keputusan (SK) Kepala Bida tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2027.
4. Menyesuaikan Sub Kegiatan yang tidak ada anggaran dengan cara mengosongkan Matrik Pada TC. 29, TC 30, TC 31 dan TC 33.
5. Menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bida dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029;
6. Menyesuaikan Peraturan Bupati nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Investasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Melakukan Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pemangku Kinerja dalam melakukan Kajian, Penelitian, Facility Study agar hasilnya benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan;

Rancangan Akhir (Ranhir) Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian penyampaian Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran 2027, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melimpahkan Kemudahan dan melancarkan apa yang direncanakan untuk kita semua.

Tenggarong, 14 Juli 2026



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BENA BENUA ETAM

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**